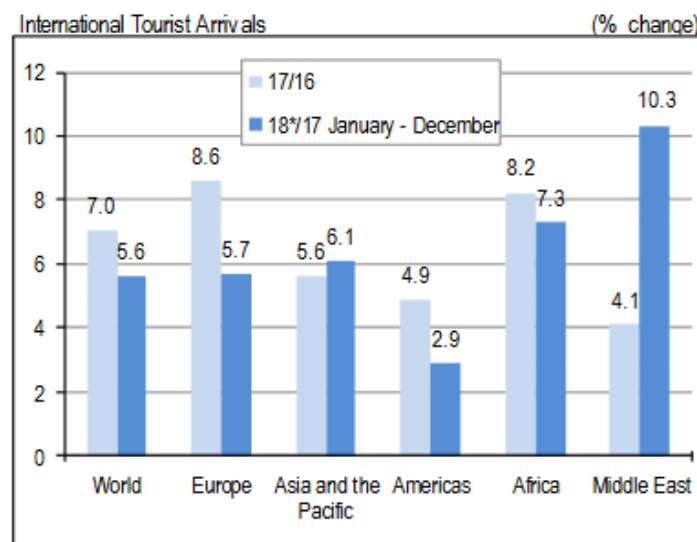


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata menjadi sektor andalan dan sumber devisa bagi negara-negara dunia pada saat krisis global terjadi pada tahun 2008. Terjadi peningkatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) dan terbukanya lapangan pekerjaan akibat meningkatnya arus pariwisata (Pfefferkorn, 2005). *United Nations – The World Tourism Organization* (UNWTO) memiliki data yang valid mengenai jumlah kedatangan turis pada sektor pariwisata internasional. Sejak tahun 2000, UNWTO memiliki data bahwa peningkatan pendapatan asli daerah secara global yakni 11,7% dan penciptaan 200 juta lapangan kerja dikontribusikan oleh sektor pariwisata.



Sumber : World Tourism Organization (UNWTO) (2018)

Gambar 1.1.
International Tourist Arrivals by regions

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa peluang besar dari sektor pariwisata sebagai basis potensial pemasukan devisa negara. Semua wilayah menikmati

peningkatan kedatangan wisatawan mancanegara di tingkat internasional, Kawasan Timur Tengah (+10%) dan Afrika (+7%) memimpin pertumbuhan kedatangan wisatawan mancanegara. Kedatangan wisatawan mancanegara ke Asia dan Pasifik dan Eropa (keduanya + 6%) meningkat sejalan dengan rata-rata dunia. Sementara pertumbuhan kedatangan wisatawan mancanegara Eropa turun dari tahun sebelumnya (+9%), menjadi (+6%) di tahun 2018, sedangkan Kawasan Asia Pasifik (+6%) dan negara Amerika adalah (+3%). Hasil keseluruhan ini didorong oleh lingkungan ekonomi yang menguntungkan dan permintaan keluar yang kuat dari pasar sumber utama (UNWTO, 2018). Pada Tahun 2019, Asia-Pasifik (+7%) dan Afrika (+7%) memimpin pertumbuhan kedatangan wisatawan mancanegara, disusul penurunan Eropa (+5%) dan Kawasan Timur Tengah (+5%), dan negara Amerika (+2%) (UNWTO, 2018).

Bagi negara dengan potensi wisata seperti Indonesia, besarnya peningkatan tersebut tentunya menjadi berkah tersendiri. Bagi Indonesia, pariwisata adalah penyumbang PDB, devisa, dan lapangan kerja yang paling sederhana dan termurah (Yahya, 2013). Oleh karena itu, upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing (wisman) tidak lagi dipertanyakan. Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-World Tourism Organization) mengapresiasi perkembangan pariwisata di Indonesia, terutama peningkatan jumlah wisatawan yang merupakan salah satu wisatawan tercepat di dunia. Bahkan, Indonesia baru-baru ini menjadi negara ke-7 di dunia, ke-4 di Asia-Pasifik tetapi peringkat pertama di Asia Tenggara dalam keterbukaan internasional menurut data keterbukaan UNWTO untuk 2016. Ini

datang sebagai hasil dari Keputusan Presiden RI pada bulan Maret 2016 yang memberikan pembebasan visa ke 169 negara dan wilayah administrasi khusus di seluruh dunia. Strategi peningkatan jumlah turis internasional yang menargetkan 20 juta turis tahun 2019 dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan pergeseran kebijakan dalam fasilitasi visa yang diharapkan menciptakan USD 24 miliar sehingga menjadikan pariwisata selaku pemasukan ekspor nomor 1 (UNWTO, 2018).

Relaksasi visa Indonesia juga berasal dari kenyataan bahwa sejak 2014, pemerintah telah memprioritaskan pariwisata sebagai sektor ekonomi utama untuk mendorong pembangunan nasional secara keseluruhan di negara Indonesia. Hal ini disebabkan dalam sebagian tahun terakhir, donasi sektor pariwisata bertambah terhadap *national income* dari 10% menjadi 17% dan naik peringkat dari posisi ke-5 menjadi penghasil devisa peringkat empat. Untuk perkiraan 20 juta wisatawan internasional untuk tahun 2019, Indonesia mengharapkan untuk memperoleh pendapatan *cash* sebanyak 24 miliar dollar AS dalam penerimaan wisatawan internasional (UNWTO, 2018).

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa Negara Indonesia terletak pada peringkat ke-4, disusul berikutnya Negara Singapore yang memiliki peringkat ke-13, kemudian Malaysia yang memiliki peringkat ke-26, serta Thailand yang memiliki peringkat ke-34 se-Asia Tenggara. Indonesia telah memanfaatkan sumber daya alamnya yang diakui secara global (peringkat ke-14) dengan harga yang sangat terjangkau (peringkat ke-5). Untuk membangun asetnya, Indonesia

The Travel & Tourism Competitiveness Index 2019, Overall Rank

Rank	Economy	Score	Rank	Economy	Score	Rank	Economy	Score
1	Spain	5.6	35	Ghana	4.0	71	Azerbaijan	3.8
2	France	5.6	36	Taiwan, China	4.0	72	Brunei Darussalam	3.8
3	Germany	5.6	37	Kazakhstan	4.0	73	Dominican Republic	3.8
4	Japan	5.4	38	Russian Federation	4.0	74	Uruguay	3.8
5	United States	5.3	39	Indonesia	4.0	75	Philippines	3.8
6	United Kingdom	5.2	40	Costa Rica	4.0	76	Jamaica	3.7
7	Australia	5.1	41	Poland	4.0	77	Sri Lanka	3.7
8	Italy	5.1	42	Turkey	4.0	78	Ukraine	3.7
9	Canada	5.1	43	Cyprus	4.0	79	Armenia	3.7
10	Switzerland	5.0	44	Egypt	4.0	80	Kazakhstan	3.7
11	Austria	5.0	45	Belarus	4.0	81	Namibia	3.7
12	Portugal	4.9	46	Finland	4.0	82	Kenya	3.6
13	China	4.9	47	Hungary	4.0	83	Serbia	3.6

Sumber: World Economic Forum (2019)

Gambar 1.2.

Travel & Tourism Competitiveness Report 2019

telah menekankan sumber daya budayanya (peringkat ke-23) dan memprioritaskan sektor Transfer Teknologi sebagai pendorong penting pembangunan ekonomi. Pemerintah mengakui potensi Transfer Teknologi dan menginvestasikan sekitar 9% dari anggarannya di sektor ini. Indonesia semakin meningkatkan keterbukaan internasionalnya (peringkat 17, naik 38 tingkat), menjadi negara dengan kebijakan visa terkuat kedua. Menggabungkan pembangunan dan kelestarian lingkungan akan menjadi kunci bagi keberhasilan sektor pariwisata di masa depan dan kesejahteraan warga negara Indonesia (WEF, 2018).

Indonesia memiliki kekayaan dalam destinasi wisata, hal ini terbukti dalam pencapaian kunjungan pariwisata tahun 2018 yakni 15.806.191 turis asing. Pada kunjungan pariwisata tahun 2018 terjadi peningkatan lawatan turis asing yakni 12,58 %. Dengan kunjungan turis sebesar itu, Indonesia memperoleh devisa

sebesar 16,426 miliar dollar AS (Kementerian Pariwisata, 2019). Dalam hal ini sektor pariwisata dikatakan berhasil karena mendapatkan posisi peringkat kedua sebagai penghasil devisa terbesar tahun 2018, walaupun belum bisa mengalahkan perolehan devisa kelapa sawit, yakni 20,54 miliar dollar AS yang berada di urutan teratas (Kompas, 2019).



Sumber: Kementerian Pariwisata (2019)

Gambar 1.3.
Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulan Jan-Des 2018

Gambar 1.3 menjelaskan tentang data kunjungan wisatawan mancanegara Bulan Januari sampai Desember tahun 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pariwisata (2019) menginformasikan bahwa bulan Juli dan Agustus 2018, lawatan wisman mencapai rekor tertinggi masing-masing berjumlah sebesar 1.540.549 dan 1.511.342 wisatawan mancanegara. Hal ini menjadi lambang keseriusan pemerintah pusat dalam memajukan kepariwisataan di Indonesia. Terbukti, bahwa Bidang Pariwisata menjadi program prioritas Presiden Jokowi.

Tabel 1.1
Sasaran Pembangunan Pariwisata 2015-2019

No.	Uraian Sasaran	Baseline 2014	2019
1.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDB Nasional	4,2%	8%
2.	Jumlah Kunjungan Wisman (kunjungan)	9 juta	20 juta
3.	Jumlah Kunjungan Wisnus (kunjungan)	250 juta	275 juta
4.	Peolehan Devisa (triliun rupiah)	120	240

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas (2019)

Pertumbuhan pariwisata tidak terlepas dari keseriusan pemerintah dalam menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan, disamping didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, keragaman budaya dan adat istiadat, serta peninggalan sejarah. Industri perjalanan mendapat perhatian yang tidak biasa dari otoritas publik belakangan ini. Hal ini nampak dari keseriusan pemerintah menetapkan pariwisata sebagai *core industry* yang didukung oleh sektor pembangunan lain. Sebagai sumber pendapatan devisa negeri atau wilayah, pariwisata merupakan bidang yang vital dalam perekonomian, pengembangan *socio-cultural*, dan memasarkan citra positif suatu daerah. Upaya yang dicoba pemerintah untuk menarik atensi turis baik dalam negeri ataupun mancanegara disebabkan pariwisata mampu menghidupkan bidang makanan dan minuman, transportasi, perhotelan, industri kreatif, dan lain-lain. Dalam bidang pariwisata, koordinasi antar *stakeholder* atau antar sektor menjadi penting sekali karena pariwisata merupakan sektor yang melibatkan sektor-sektor lainnya.

Gambar 1.4 dibawah ini, Indonesia diresmikan sebagai destinasi pariwisata halal terbaik di dunia bersama Malaysia (Global Muslim Travel Index,

RANK	GMTI 2019 RANK	DESTINATION	SCORE	CHANGE
1	1	Malaysia 	78	0
1	1	Indonesia 	78	1
3	3	Turkey 	75	1
4	4	Saudi Arabia 	72	1
5	5	United Arab Emirates 	71	-3
6	6	Qatar 	68	0
7	7	Morocco 	67	3
8	8	Bahrain 	66	0
8	8	Oman 	66	1
10	10	Brunei 	65	1

Sumber : Mastercard-Crescentrating (2019)

Gambar 1.4.
Global Muslim Travel Index 2019 Rank

2019). Indonesia berhasil mengungguli 130 destinasi *halal tourism* dari segala penjuru dunia. Negara Indonesia dan Malaysia mendapatkan skor yang sama dalam penilaian destinasi pariwisata halal yakni 78 sehingga baik Indonesia dan Malaysia menempati peringkat teratas. Terpilihnya Indonesia sebagai peringkat pertama dalam destinasi pariwisata halal bukan hal mudah, namun pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan hal tersebut selama kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dari catatan sejarah yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Indonesia masih menempati peringkat keenam, peringkat keempat pada tahun 2016, peringkat ketiga pada tahun 2017, peringkat kedua pada tahun 2018, serta peringkat pertama pada tahun 2019. Ikhtiar pemerintah Indonesia untuk mencapai posisi terbaik, salah satunya dengan menggagas Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) yang kinerjanya berpedoman pada Global Muslim Travel Index (GMTI), yakni berdasarkan empat kriteria

penilaian; akses, komunikasi, lingkungan, serta layanan (Mastercard-Crescentrating, 2019).

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata halal di Indonesia. Adanya ancaman mispersepsi pemahaman akan pariwisata halal dapat menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Oleh karena itu, DSN – MUI telah menetapkan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah melalui fatwa nomor 108/DSN-MUI/X/2016 agar ada pemahaman yang sama antara pemerintah, *stakeholder*, dan masyarakat mengenai pariwisata halal. Dalam fatwa tersebut menetapkan tentang prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, ketentuan-ketentuan terkait para pihak dan akad, hotel syariah, wisatawan, destinasi wisata, spa, sauna dan *massage*, biro perjalanan wisata, serta pemandu wisata (Sayekti, 2019).

Keseriusan pemerintah Indonesia juga terlihat pada upaya pembentukan *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) pada tahun 2019 yang telah menghasilkan provinsi-provinsi destinasi pariwisata halal unggulan di Indonesia. Andriani (2015) mengungkapkan bahwa Nusa Tenggara Barat, Bali, Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau, serta Yogyakarta adalah 13 provinsi di Indonesia yang ditetapkan sebagai destinasi pariwisata halal unggulan oleh kementerian pariwisata. Dalam percepatan Indonesia sebagai kiblat destinasi pariwisata halal dunia, langkah diatas adalah langkah strategis yang harus terus dilakukan oleh kementerian pariwisata Indonesia, utamanya dalam hal monitoring dan evaluasi.

Dari 13 provinsi unggulan tersebut, Jawa Timur adalah salah satu provinsi unggulan yang diharapkan menjadi provinsi terbaik dalam destinasi pariwisata halal di Indonesia.



Sumber : BPS (2018)

Gambar 1.5.
Hasil Survey Perjalanan Wisnus Jawa Timur dan Nasional, 2016-2017

Gambar 1.5 menunjukkan hasil survey perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara di Jawa Timur dan Nasional. Perjalanan yang dilakukan penduduk Jawa Timur mengalami peningkatan pada Tahun 2017 sebesar 1,12% atau setara dengan 482,104 perjalanan. Perjalanan yang dilakukan penduduk Indonesia naik sebesar 2,45% pada Tahun 2017 atau setara dengan 270,822,003 perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur adalah provinsi unggulan yang sangat potensial untuk mengembangkan pariwisata halal di Indonesia.

Daya tarik Jawa timur adalah keragaman budaya, wisata sejarah, wisata alam, dan wisata buatan yang mampu menarik turis asing berkunjung ke Jawa Timur. Tak khayal, jika sektor pariwisata Jawa Timur yang merupakan sektor unggulan destinasi pariwisata halal di Indonesia mampu menjadi penopang

perkembangan ekonomi wilayah (Bappenas, 2015). Menurut (Lembayun, 2012), yang menjadi penyebab Jawa Timur menjadi kawasan strategis dalam pengembangan pariwisata nasional adalah Jawa Timur berada pada jalur perjalanan pariwisata nasional. Bahkan, Bromo Tengger Semeru yang berada di provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai 10 destinasi prioritas dalam pengembangan pariwisata unggulan nasional oleh kementerian pariwisata. (Ratman, 2016).

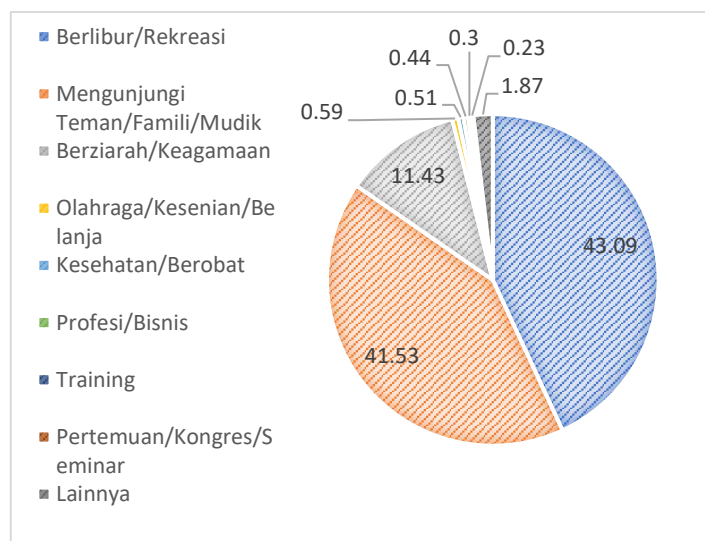
Tabel 1.2
Data Kunjungan Wisatawan Domestik, Mancanegara dan PDRB Sektor
Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Tahun	Kunjungan Wisatawan		PDRB
	Domestik	Mancanegara	
2012	33,2 juta orang	263.943 orang	Rp 75,61 Triliun
2013	39,68 juta orang	300.909 orang	Rp 88,16 Triliun
2014	45,6 juta orang	463.193 orang	Rp 101,9 Triliun
2015	51,46 juta orang	612.412 orang	Rp 92,68 Triliun
2016	55,0 juta orang	618.536 orang	Rp 106,27 Triliun

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (Data diolah)

Pada tabel 1.2 diatas menginformasikan bahwa setiap tahun jumlah turis dalam negeri yang berkunjung ke Jawa Timur terus mengalami kenaikan. Perihal yang sama juga tampak pada jumlah kunjungan turis mancanegara. Dari tahun 2012 sampai 2016, jumlah kunjungan turis mancanegara di Jawa Timur cenderung bertambah. Keberadaan kunjungan turis dalam negeri dan asing menjadikan *tourism* menjadi salah satu sektor penggerak pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Timur. Bersumber pada informasi BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, sumbangsih pariwisata terhadap perekonomian Jawa Timur sepanjang rentang tahun 2012- 2016 dominan mengalami kenaikan. Sumbangsiah PDRB pariwisata, yakni 75, 61 Triliun Rupiah pada tahun 2012 mengalami

kenaikan atau bertambah 88, 16 Triliun Rupiah pada tahun 2013, serta bertambah 101, 9 Triliun Rupiah pada tahun 2014. Walaupun sumbangsih PDRB pariwisata terjadi penyusutan 92, 68 Triliun Rupiah pada tahun 2015, PDRB pariwisata Jawa Timur kembali menguat pada tahun 2016, yakni menjadi 106, 27 Triliun Rupiah.



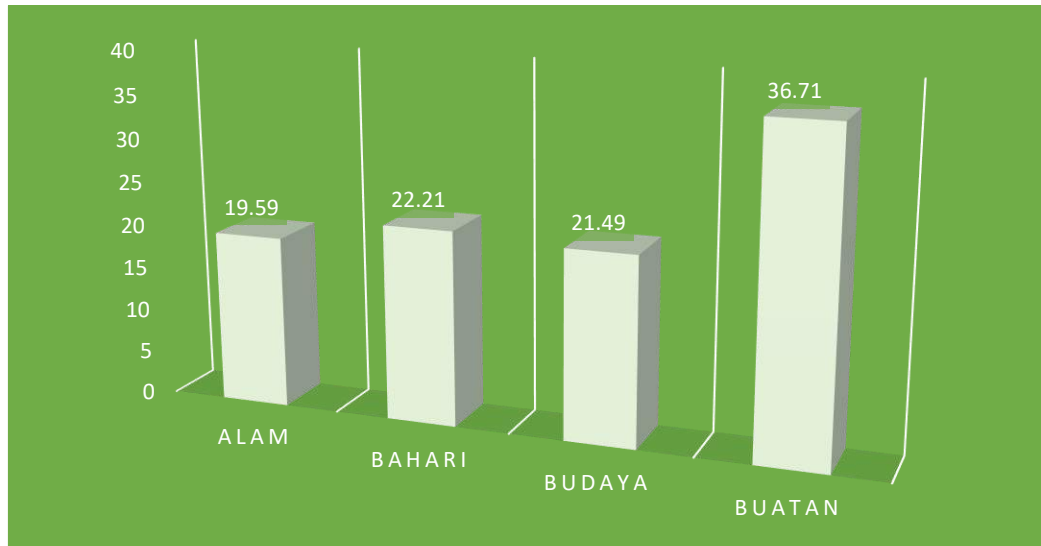
Sumber : BPS (2019)

Gambar 1.6.

Prosentase Penduduk Jatim yang Melakukan Perjalanan Dirinci Menurut Maksud Utama Perjalanan, Januari-Agustus 2017

Gambar 1.6 menunjukkan pada Tahun 2017 di Jawa Timur perjalanan berlibur/rekreasi menduduki prosentase terbesar dilanjutkan dengan mengunjungi teman/family/mudik, dan berziarah/keagamaan. Prosentase ini berbeda dengan prosentase nasional pada Tahun 2017 dimana yang menduduki prosentase tertinggi adalah mengunjungi teman/family/mudik (44,56%) kemudian dilanjutkan dengan berlibur/rekreasi (41,16%), dan berziarah/keagamaan (5,86%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa perjalanan pariwisata dilakukan sebagian besar masyarakat baik di Jawa Timur maupun nasional. Peluang yang dimiliki setiap wilayah harus diiringi dengan pengembangan pariwisata sehingga

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar melalui kunjungan wisatawan nusantara.



Sumber : BPS (2018)

Gambar 1.7.

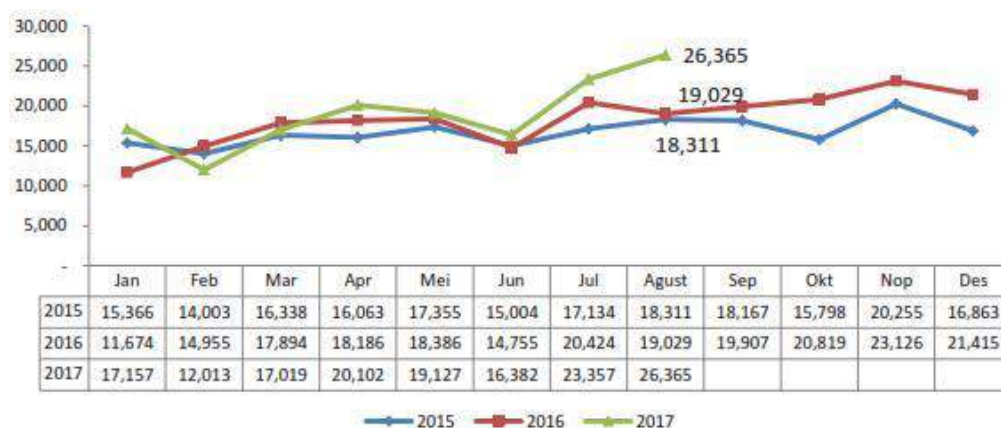
Prosentase penduduk Jatim yang Melakukan Perjalanan Menurut Obyek Wisata yang Dikunjungi, Januari-Agustus 2019

Gambar 1.7 menunjukkan penduduk di Jawa Timur banyak yang menyukai pariwisata buatan manusia seperti kebun raya, *water park*, arena bermain. Kabupaten Pamekasan yang memiliki wisata bahari dapat dikombinasikan dengan pariwisata buatan manusia, misalnya dengan penambahan arena bermain anak sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Wisata bahari menempati posisi ke dua obyek wisata yang banyak dikunjungi wisnus Jawa Timur, dilanjutkan dengan wisata budaya (21.49) dan alam (19.59).

Sektor pariwisata selain memiliki kontribusi langsung terhadap perekonomian, juga memiliki kontribusi secara tidak langsung terhadap pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur, pembelian barang dan jasa dalam negeri, serta input dan arus investasi (*World Trade Organization*, 2016). *The*

tourism sector and tourism travel are the fastest growing sectors in the world karena memiliki kemudahan peluang bekerja paruh waktu dan musiman, serta persyaratan yang mudah, baik bagi pekerja terampil maupun tidak terampil (*World Travel & Tourism Council*, 2019). Pariwisata memiliki *backward linkage* dengan pertanian, perikanan, konstruksi, serta telekomunikasi (*World Trade Organization*, 2016).

Setelah diresmikan sebagai salah satu provinsi destinasi pariwisata halal unggulan dari 13 provinsi oleh Kementerian Pariwisata, Jawa Timur mulai serius dan fokus memajukan pariwisata halal. Faktor – faktor pendukung kemampuan Jawa Timur dalam pengembangan pariwisata halal, yaitu; 1) populasi umat muslim yang dominan, sebagian besar penduduk Jawa Timur beragama Islam.; 2) *Cultural diversity*, Budaya-budaya di Jawa Timur memiliki banyak ragam budaya, Jawa Timur terkenal kental dengan kebudayaan muslimnya karena banyaknya jumlah pondok pesantren. Eksistensi Wali Songo di Jawa Timur merupakan bukti otentik sejarah pertumbuhan Islam nusantara terpusat di provinsi Jawa Timur; 3) Banyaknya destinasi wisata religi di Jawa Timur, ada masjid - masjid dan tempat ziarah atau *pasarean* tokoh-tokoh penyebar agama islam di Jawa Timur. Destinasi wisata alam di Provinsi Jawa Timur juga tak kalah memukau; serta 4) Akomodasi dan amenitas, seperti penginapan atau hotel, atraksi, kerajinan, restoran yang memiliki sertifikat halal, serta lembaga keuangan syariah dan rumah sakit Islam yang memadai (Syah, 2019).

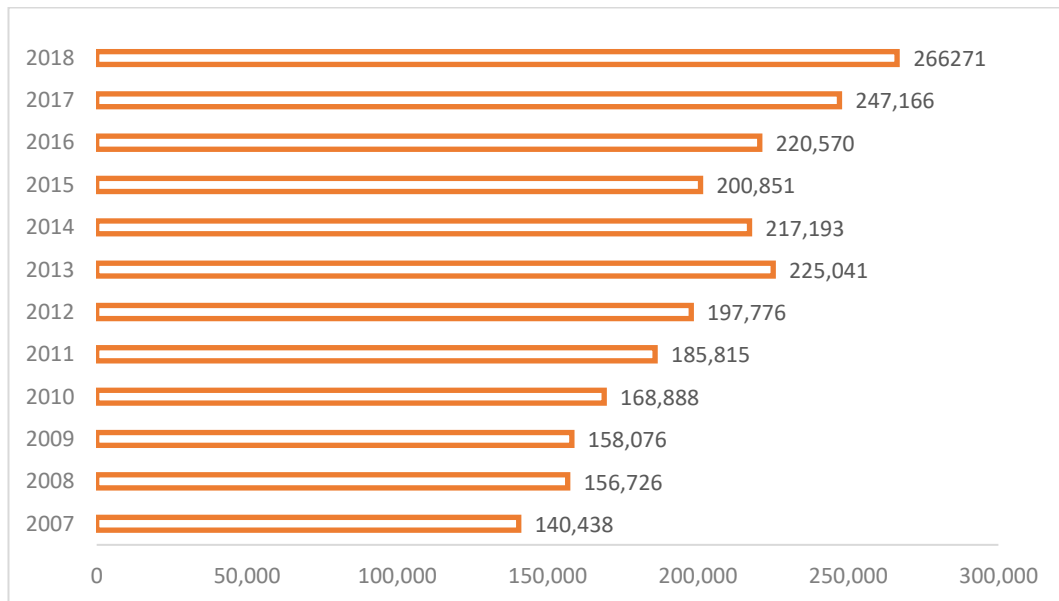


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2017)

Gambar 1.8.

Grafik Jumlah Turis Mancanegara yang Datang ke Jawa Timur Melalui Pintu Masuk Juanda Tahun 2015-2017

Gambar 1.8 mengungkapkan bahwa kunjungan yang dilakukan turis mancanegara ke Jawa Timur mendapat rangking kelima. Bali masih bertengger di peringkat pertama, disusul oleh Jakarta, Batam, dan Medan. Hal ini berpedoman pada jumlah kunjungan turis mancanegara di Jawa Timur melalui pintu masuk Bandara Juanda Surabaya dari tahun 2015 sampai bulan agustus 2017 yang menunjukkan kenaikan. BPS Provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwa terdapat kenaikan kunjungan turis asing, yakni 11, 99% pada bulan Januari – Agustus tahun 2017 yakni 151.522 kunjungan turis asing dibandingkan dengan jumlah turis asing pada tahun 2016, yakni 135. 303 kunjungan turis asing. Negara Malaysia merupakan negeri asal turis asing yang paling banyak datang berkunjung ke Jawa Timur, kemudian Negara Singapura dan Cina dengan rata-rata lama menginap tamu (RMLT) turis asing dua hingga tiga hari pada hotel berbintang.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Gambar 1.9.
Kunjungan Turis Mancanegara ke Jawa Timur, 2007-2018

Gambar 1.9 menunjukkan total lawatan turis asing ke Jawa Timur. Kunjungan wisman mencapai puncaknya tahun 2013, namun tahun 2014 terjadi penurunan. Pada Tahun 2018 kunjungan wisatawan mencapai angka yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. Data tersebut menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara di Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk Kabupaten Pamekasan yang memiliki potensi pariwisata yang tinggi. Tren positif kunjungan wisatawan mancanegara di Jawa Timur menandakan bahwa provinsi Jatim layak menyandang provinsi unggulan destinasi pariwisata halal nasional.

Sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, pariwisata menjadi sektor dalam strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), hal ini diungkapkan oleh Riyadi (2009). Adanya otonomi daerah dan globalisasi mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tepat

dan tidak menggantungkan pada kebijakan pemerintah pusat saja. Kebijakan otonomi daerah memberikan kebebasan kepala daerah untuk mengelola sektor pariwisata secara otonom. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki kajian atau hasil analisa SWOT terkait potensi daerahnya dalam hal pengembangan pariwisata dan membuat langkah strategis untuk memajukan pariwisata di daerahnya masing-masing.

Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan manajemen yang efektif dan efisien dalam membangun industri pariwisata untuk menarik *stakeholder* pariwisata. Hal ini penting mengingat otonomi daerah memberikan keleluasan pemerintah daerah untuk bersaing sehat dengan daerah lainnya dalam menarik investor dan turis asing maupun domestik. Persaingan ekonomi kota dari sudut pandang pariwisata, perdagangan, dan investasi menjadi sangat intensif karena ekonomi dunia menjadi global. Kota-kota tertentu menarik semua aset dan perhatian, sementara yang lainnya menjadi lebih atau kurang tidak terlihat (Herget, 2015). Dalam beberapa tahun terakhir, menurut Kotler (2002) mengemukakan bahwa kota mencari cara baru untuk mempromosikan diri mereka sendiri karena perubahan cepat pada teknologi dan pergeseran dari lokal ke lingkungan global, kota-kota terpaksa bersaing dengan masing-masing lain untuk menjadi tujuan wisata yang menarik, tempat kerja, sosial budaya, dan banyak lagi. Kavaratzis (2005) mengungkapkan bahwa pengaruh globalisasi menyebabkan terjadinya peningkatan persaingan antar daerah kota atau kabupaten yang terlihat dalam kegiatan – kegiatan masyarakat maupun pemerintah daerah.

Kabupaten Pamekasan selain dikenal dengan kota pendidikan & pesantren

juga dikenal sebagai kota Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam). Kebudayaan Islam di Pamekasan sangat kental sehingga hal ini banyak mempengaruhi perkembangan sektor pariwisata. Secara geografis Kabupaten Pamekasan memiliki potensi wisata yang beragam. Potensi pariwisata tersebut terdiri dari wisata alam, religi, budaya, dan buatan. Wisata alam tersebut yakni perbukitan, pantai, suasana desa, dan lainnya. Akan tetapi, potensi pariwisata yang besar ini belum mampu dikelola dengan baik, tepat, dan optimal. Misalnya sumber daya manusia, infrastruktur, amenities, atraksi, regulasi, manajemen pemasaran belum dikelola secara profesional (Reindrawati, 2013).

Adanya potensi sumber daya kepariwisataan, *historical heritage*, dan *cultural wealth* adalah kekuatan untuk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pamekasan. Pembangunan kepariwisataan di Pamekasan harus meninjau keselarasan perencanaan pembangunan destinasi pariwisata dengan kapasitas kemampuan APBD pemerintah Kabupaten Pamekasan. Kelarasan atau kesesuaian antara perencanaan pembangunan destinasi pariwisata dengan kemampuan daerah akan menentukan keberhasilan pembangunan industri pariwisata di Kabupaten Pamekasan. Otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah harus bisa mengandalkan kemampuan sendiri dalam mengelola daerahnya, kepala daerah perlu memiliki *political will* yang kuat untuk membangun industri pariwisata.

Potensi pariwisata Pemerintah Kabupaten Pamekasan cukup besar dan dapat dikelompokkan menjadi menjadi pariwisata sejarah, minat khusus, alam, religi, kuliner, serta budaya (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kab. Pamekasan,

2019). Wisata alam antara lain api tak kunjung padam, pantai talang siring, pantai jumiang, goa batu akik, dan puncak brukoh. Wisata budaya antara lain karapan sapi, kontes kecantikan sapi sono', festival budaya Madura, *Madura ethnic carnival*, malam kemilau Madura, Madura musik daul festival, drumband festival, festival jazz dan *culture*, Pamekasan musik patrol, Gebyar budaya lebaran ketupat, *tanian lanjheng* festival, festival seni pencak silat, serta jumiang *beach* 'petik laut' festival. Wisata sejarah antara lain monumen arek lancor dan museum mandilaras. Wisata kuliner Pamekasan dikemas dalam acara festival dan pameran durian lokal Pamekasan dan kawasan kuliner '*Sae Salera*'. Wisata minat khusus yakni wisata buatan bukit cinta Pamekasan. Wisata religi antara lain pasarean Batu Ampar, masjid jamik *asy-syuhada*' Pamekasan, makam Jaka Tharub, vihara alokitesvara, dan makam raja Pamekasan 'Panembahan Ronggosukowati' (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2019).

Pengembangan *halal tourism* di Pamekasan menjadi sangat potensial dengan jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 871.497 jiwa (BPS Kabupaten Pamekasan, 2018), prosentase penduduk beragama Islam di Kabupaten Pamekasan mencapai 98,9 persen (Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2018). Selama 16 tahun, Pamekasan memiliki *city branding* islami "Bumi Gerbang Salam", 201 pondok pesantren, 1.036 masjid, serta 4.850 mushola (Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2017). Potensi pesantren dan masjid sebagai ekosistem muatan pariwisata halal di Kabupaten Pamekasan sangat besar. Pioner wisata pesantren di Madura adalah Pondok Pesantren Al-Amien Prenduen Kabupaten Sumenep. Masjid Agung Pamekasan juga memiliki potensi jika

dijadikan wisata masjid seperti masjid Istiqlal di Jakarta dan Masjid Negara dan Putrajaya di Malaysia yang telah berhasil menarik wisatawan mancanegara.

Ekosistem pengembangan *halal tourism* di Kabupaten Pamekasan juga didukung oleh regulasi Pemkab Pamekasan yang telah menerapkan perda syariah. Produk hukum tersebut adalah a) Perda nomor 18 tahun 2001 mengenai larangan minuman beralkohol; b) Larangan atas pelacuran dalam Perda nomor 18 tahun 2004; c) Perda nomor 3 tahun 2015 mengenai penyelenggaraan hiburan dan rekreasi. Beberapa perda syariah diatas telah mengatur mengenai larangan-larangan yang ada di Al-Qur'an sehingga menambah faktor pendukung dalam pengembangan *halal tourism* di Pamekasan. Ditambah lagi regulasi yang rinci seperti; d) tata kelola hotel, penginapan, dan rumah kos dalam Perda nomor 14 tahun 2014; dan e) Perbub nomor 14 tahun 2016 mengeai penyelenggaraan usaha hiburan karaoke adalah regulasi-regulasi yang mendukung pembangunan *halal tourism* di Kabupaten Pamekasan. Kemudian dari sisi regulasi yang mendukung kelembagaan dan SDM Islam, didukung regulasi seperti; f) Perda nomor 3 tahun 2017 mengeai penyelenggaran madrasah diniyah; dan g) Keterampilan baca Al-Qur'an bagi anak didik muslim dalam Perda nomor 4 tahun 2014. h) Perda syariah lainnya adalah Perda nomor 5 tahun 2014 tentang penertiban kegiatan di Bulan Ramadhan; i) pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam Perda nomor 7 tahun 2008; serta j) Penetapan Gerbangsalam sebagai model dan strategi dakwah dalam Keputusan Bupati nomor 300 tahun 2009 adalah faktor *strengthness* Pemkab Pamekasan dalam mengembangkan pariwisata halal di Pamekasan.

Pengembangan destinasi wisata belum mampu memantik perhatian

wisatawan mancanegara sehingga target kunjungan wisatawan mancanegara Kabupaten Pamekasan rendah. (Jawa Pos Radar Madura, 2019: 21). Tahun 2018, total wisatawan nusantara yang berkunjung sekitar 100 ribu orang. Sementara, hanya 30 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pamekasan. Sementara tahun 2019, target kunjungan wisatawan mancanegara hanya 50 orang (Jawa Pos Radar Madura, 2019: 21). Kabupaten Pamekasan telah berupaya melakukan promosi di tingkat regional, bekerjasama dengan agen travel, dan mengembangkan sejumlah destinasi wisata seperti Pantai Jumiang dan Pantai Talang Siring. Namun, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengakui upaya tersebut belum berhasil mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bumi Gerbang Salam (Disparbud Kabupaten Pamekasan, 2019).

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga (LPPM) yang menemukan bahwa sangat minimnya kondisi fasilitas pendukung aktivitas kepariwisataan dalam bentuk fisik seperti; akses jalan, kondisi penginapan, kondisi toilet selama ini oleh sebagian responden dinilai perlu ditingkatkan karena kondisinya masih belum terlalu bagus (LPPM UNAIR, 2019). Bahkan sebanyak 45% responden menyampaikan untuk fasilitas kuliner dinilai masih kurang bagus. Data yang sama juga terlihat terkait dengan penilaian responden tentang kondisi pusat oleh-oleh dimana sebagian besar (58%) menilai masih kurang bagus (LPPM UNAIR, 2019).

Kabupaten Pamekasan yang telah menerapkan gerakan pembangunan masyarakat islami yang diwujudkan dalam perda syariah sering kali mengalami polemik sosial yang bersinggungan dengan usaha pariwisata. Pada Bulan Januari

Tahun 2016, para ulama dan warga Pamekasan menyegel hotel yang berbentuk kapal kandas di desa Ambat kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan (liputan6, 2016). Penyebab penutupan paksa hotel berbintang tiga oleh para ulama yang tergabung dalam Aliansi Ulama Madura tersebut di klaim karena pemilik hotel yang merupakan keturunan non-pribumi telah mengabaikan budaya agama Islam di Bumi Gerbangsalam dan diklaim permasalahan izin yang belum tuntas (koranmadura, 2016). Pada bulan Desember Tahun 2018, puluhan massa Laskar Merah Putih (LMP) menggelar aksi demonstrasi di depan Hotel Bintang Tiga, yakni Hotel Front One di Jalan Jokotole Pamekasan. Pendemo menuntut Hotel Front One Pamekasan ditutup lantaran ada masalah dokumen perizinan (radarmadura.jawapos, 2018). Akademisi sekaligus pakar pariwisata dari Universitas Brawijaya menyayangkan demonstrasi tersebut karena Hotel Front One di Pamekasan dinilai telah memberikan penghidupan bagi warga Pamekasan dan menyayangkan aksi tersebut karena adanya gerakan komunitas untuk melakukan demonstrasi pada hotel adalah sejarah di Madura, yakni belum ada hotel didemo, hanya terjadi di Pamekasan (Jatimpos, 2018). Jika berkaitan dengan pelanggaran perizinan, Pamekasan belum mempunyai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dan jika harus hotel syariah, Pemkab Pamekasan belum memiliki regulasi yang mengatur tentang hotel syariah (Jatimpos, 2018).

Pada bulan Januari tahun 2019, ulama dan tokoh masyarakat Pamekasan meminta wisata Puncak Ratu di desa Tebul Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ditutup, padahal tempat wisata Puncak Ratu baru dibangun pada bulan Desember 2018 (mediamadura.com, 2019). Desakan penutupan

tersebut karena diduga wisata Puncak Ratu dijadikan sarang maksiat, padahal menurut pemilik wisata tuduhan tersebut tidak benar karena untuk menghindari hal-hal tersebut, wisata Puncak Ratu dijaga ketat oleh 14 orang penjaga dengan jam buka wisata dari pagi hingga sore hari (mediamadura, 2019). Bahkan pada tahun 2009, MUI Pamekasan mengeluarkan fatwa yang melarang konser Ridho Rhoma dengan alasan bahwa konser adalah sumber maksiat atau dapat mendatangkan kemaksiatan di Kabupaten Pamekasan (republika, 2009). Hal ini juga terjadi pada Nissa Sabyan, Band Gambus dengan misi dakwah ini gagal konser di Pamekasan karena ditolak LSM Pamekasan dengan alasan yang sama pada bulan Februari tahun 2020 (indonesiapos, 2020).

Puncak polemik sosial terjadi pada bulan Februari Tahun 2020, Bioskop yang baru selesai dibangun dengan perizinan yang lengkap di Pamekasan ditolak keras dan dituntut oleh ormas Islam di Pamekasan agar bioskop tersebut segera melakukan penutupan. Jika menolak tuntutan tersebut, ormas Islam mengancam akan membakar bioskop tersebut / Bupati Pamekasan (mediajatim, 2020). MUI Pamekasan mengungkapkan bahwa Bioskop Kota Cinema Mall Pamekasan ditentang karena tidak sesuai dengan kearifan lokal di Pamekasan sehingga pembangunan di Madura harus bernilai islami dan menganggap tempat hiburan di Pamekasan sebagai biang dari segala masalah (timeindonesia, 2020).

Gambar 1.10 dibawah menjelaskan terjadinya tragedi pembakaran tempat wisata bukit bintang di Kecamatan Palengaan Pamekasan pada bulan Oktober Tahun 2020 menambah carut-marutnya permasalahan pariwisata di Kabupaten Pamekasan. Massa membakar tempat wisata tersebut karena diduga menjadi



Sumber: Kompas (2020)

Gambar 1.10.

Tempat wisata Bukit Bintang di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, dibakar warga karena diduga menjadi sarang maksiat

sarang maksiat dan dinilai mengganggu kegiatan belajar-mengajar pondok pesantren yang letaknya berdekatan dengan Bukit Bintang (regional.kompas, 2020). Merespon tragedi pembakaran tempat wisata tersebut, pada tanggal 5 Oktober 2020, dalam kesempatan pidato penyerahan SK dan pengambilan sumpah 339 PNS, Bupati Pamekasan menyampaikan bahwa Pemkab sedang menyusun konsep wisata halal/syariah di Pamekasan, padahal MUI Pamekasan telah mempunyai dan mengusulkan konsep wisata halal/syariah kepada Pemkab. Berdasarkan penelitian awal, Bapak Faidlal (Akademisi Bidang Pariwisata dari Universitas Brawijaya) dan Bapak Ali Mukti (Praktisi Bidang Pariwisata dari Kabupaten Pamekasan) menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengadakan pertemuan pada tahun 2018 yang dihadiri oleh unsur Ulama dari Madura khususnya Pamekasan dalam rangka penyusunan konsep wisata halal

Madura. Namun, hanya ulama dari Pamekasan yang menolak usulan tersebut sehingga konsep wisata halal yang telah disusun, tidak dapat diterapkan di Kabupaten Pamekasan (Rahman, 2020). Hal inilah yang menjadi urgensi penulis menulis judul penelitian “Analisis Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Pamekasan”. Kajian yang menggunakan metode *Analytical Network Process* diharapkan menjadi *problem solver* dan pedoman dalam hal pengambilan kebijakan Pemkab Pamekasan untuk menyelesaikan carut-marutnya permasalahan pariwisata di Pamekasan dan menjadi pionir penelitian pariwisata halal di Kabupaten Pamekasan yang akan mendukung 10 program prioritas Bupati Pamekasan periode 2019-2024.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah yang disusun berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, jadi rumusan masalah yang menjadi fokus kajian adalah ;

1. Apa saja kendala-kendala yang menghambat pengembangan *halal tourism* di Pamekasan ?
2. Solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan *halal tourism* di Kabupaten Pamekasan ?
3. Langkah-langkah strategis apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan *halal tourism* di Kabupaten Pamekasan ?

1.3 Tujuan penelitian

Berpedoman terhadap rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah;

1. Mengurai permasalahan pariwisata dan mencari akar permasalahan yang menghambat pengembangan *halal tourism* di Kabupaten Pamekasan.
2. Memberikan solusi-solusi yang tepat untuk dapat mengembangkan *halal tourism* di Kabupaten Pamekasan.
3. Mencari strategi yang tepat untuk mengembangkan pariwisata halal di Kab. Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dirangkum sebagai berikut ;

1. Kajian dapat menjadi rujukan Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk pengambilan kebijakan dalam mengembangkan *halal tourism*.
2. Kajian mampu menyamakan persepsi para *stakeholder* pariwisata di Kabupaten Pamekasan untuk pengembangan pariwisata halal.
3. Kajian penelitian mampu memberikan *transfer knowledge* terhadap masyarakat Kabupaten Pamekasan sehingga mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama pemerintah membangun pariwisata halal di Kabupaten Pamekasan.
4. Penelitian ini mampu menjadi rujukan peneliti lainnya untuk melanjutkan penelitian mengenai *halal tourism* di Pamekasan.

1.5 Sistematika Tesis

Agar penelitian tesis dapat dipahami dengan mudah, maka penulis menyusun tesis secara sistimatis dan memiliki kohesi serta koherensi antar bab 1 sampai bab 5, sistimatika penulisan tesis sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab pertama adalah bab paling penting yang mendasari penulis untuk menulis topik penelitian. Pembahasan masalah-masalah yang menghambat topik penelitian, kemudian menjadi rumusan masalah penelitian, dan tujuan penelitian, manfaat kajian, serta sistematika penulisan adalah hal penting yang dibahas dalam bab pertama.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua adalah bab yang menguraikan tentang teori-teori yang dipakai dalam kajian ini. Landasan teori yang berhubungan dengan tema penelitian seperti teori *tourism* dan pariwisata halal, kemudian referensi jurnal-jurnal scopus pada penelitian sebelumnya hingga kerangka berfikir disusun dalam bab kedua.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, penentuan obyek penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, sumber data serta teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi pariwisata halal dan rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Pamekasan. Selain itu metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, ruang lingkup dalam penelitian ini membahas tentang penguraian masalah pada pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Pamekasan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan *dept interview*. Metode analisis data yang digunakan untuk menentukan bobot dari kriteria-kriteria yang berpengaruh pada pemilihan

solusi yang tepat dalam rangka pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Pamekasan.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab hasil dan pembahasan penelitian menjelaskan mengenai gambaran pariwisata Kabupaten Pamekasan pada umumnya dan potensi pariwisata halal. Bab keempat juga membahas mengenai kondisi sosio-kultur yang mempengaruhi perkembangan pariwisata di Kabupaten Pamekasan. Kemudian penulis menjelaskan penemuan hasil penelitian yang diolah melalui aplikasi *super decision* ANP. Setelah peneliti memberikan data hasil olahan aplikasi tersebut, peneliti mengungkapkan hasil temuan melalui wawancara mendalam yang dilakukan para ahli.

BAB 5 : SIMPULAN

Bab terakhir, penulis menjelaskan tentang rangkuman dan simpulan dari keseluruhan isi penelitian. Penulis juga memberikan penjelasan keterbatasan kajian dan pedoman untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.